

TEMUI KANWILDITJENPAS, OMBUDSMAN RI SOROTI PENGAMANAN LAPAS PASCATEMUAN 6,8 KG GANJA

Kamis, 18 Juni 2026 - sumut

Medan - Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Syafrida Rachmawati Rasahan bersama dengan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Herdensi melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Kamis (18/6/2026). Kunjungan tersebut disambut oleh Kepala Bidang Perawatan keamanan dan kepatuhan Internal, Rindra dan jajaran.

Kunjungan dilakukan untuk memastikan penanganan serta upaya yang dilakukan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara atas temuan 6,8 kilogram narkoba jenis ganja pada Lapas Kelas IIB Padangsidempuan.

Syafrida Rachmawati Rasahan menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh dan penguatan sistem pengamanan di lingkungan pemasyarakatan. "Lapas/rutan merupakan tempat pembinaan bagi para terpidana sebelum kembali ke masyarakat sehingga perlu adanya pengetatan keamanan untuk menjamin proses pembinaan berjalan optimal. Hal ini akan mendukung keberhasilan dalam asimilasi maupun reintegrasi warga binaan," ucap Syafrida.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Herdensi menekankan bahwa pentingnya transparansi dalam penanganan kasus temuan 6,8 kilogram narkoba jenis ganja di Lapas Kelas IIB Padangsidempuan serta langkah pencegahan yang akan dilakukan ke depan.

"Kami meminta keterbukaan dari Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara terkait penyebab masuknya narkoba jenis ganja ke dalam lapas, termasuk upaya mitigasi dan langkah-langkah perbaikan yang dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali," tegasnya.

Selain melakukan diskusi dengan jajaran Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Ombudsman juga melakukan peninjauan langsung ke dalam lapas tanjung Gusta. Ombudsman meninjau beberapa titik layanan, mulai dari area pemeriksaan keamanan pengunjung, klinik kesehatan, hingga dapur penyediaan makanan. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada warga binaan tetap berjalan sesuai standar serta memenuhi prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik.

Melalui kunjungan tersebut, Ombudsman RI berharap penguatan sistem pengamanan dan pengawasan di lingkungan pemasyarakatan dapat terus dilakukan guna menciptakan lapas dan rutan yang aman, tertib, serta mendukung keberhasilan proses pembinaan warga binaan. (*)